

Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Assistance in the Preparation of Work Program Plan Documents for Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Tanjung Batu District, Ogan Ilir Regency

Sunardi^{1)*}, Abid Djazuli²⁾, Gusmiatun³⁾, Gumar Herudiansyah²⁾

¹⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

²⁾Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

³⁾Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang

*Corresponding author: Sunardi; sunardifeb@gmail.com

Received Juni 2022, Accepted Juli 2022

ABSTRAK. Dokumen rencana program kerja merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Rendahnya pengurusan badan hukum BUMDes disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia. Kompetensi minimal untuk menyusun rencana program kerja adalah pemahaman manajemen dan laporan keuangan (akuntansi), sedangkan kondisi di lapangan pengurus BUM Desa sebagian besar tidak memiliki kompetensi tersebut, sehingga pengurusan badan hukum terhenti. Kecamatan Tanjung Batu memiliki 11 BUM Desa, dari jumlah tersebut 1 BUM Desa sudah mengajukan proses badan hukum. Kegiatan difokuskan pada pendampingan pada 5 BUM Desa yang belum mengajukan proses badan hukum dan terkendala pada dokumen rencana program kerja. Kegiatan pendampingan memerlukan waktu 12 jam yang terbagi dalam 3 kali pertemuan, bertempat di Pondok Tanjung Batu. Kegiatan menggunakan metode *participatory action research* (PAR), melibatkan pengurus BUMDes dan mahasiswa. Kegiatan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu (1) persiapan, (2) pelaksanaan kegiatan dan (3) evaluasi dan penutup. Hasil kegiatan penyusunan program kerja BUMDes terlaksana dengan baik, sehingga siap untuk mengurus badan hokum masing-masing BUMDes.

Kata kunci: Badan usaha milik desa; program kerja.

ABSTRACT. *The work program plan document is a requirement that must be met in the management of legal entities of Village-Owned Enterprises (BUMDes). Limited human resources cause the common control of BUMDes legal entities. The minimum competence to prepare a work program plan is understanding management and financial statements (accounting). In contrast, the conditions in the field of village BUM management mostly do not have these competencies, so the direction of legal entities is stopped. Tanjung Batu Subdistrict has 11 Village BUMDes, and 1 Village BUMDes has applied for a legal entity process. The activity focused on mentoring 5 Village BUM that had not yet submitted a legal entity process and was constrained by the work program plan document. The mentoring activity takes 12 hours, divided into three meetings, located at Pondok Tanjung Batu. The activity uses the participatory action research (PAR) method, involving BUMDes administrators and students. Activities are carried out in 3 stages, namely (1) preparation, (2) implementation of activities and (3) evaluation and closing. The results of the BUMDes work program preparation activities are carried out properly so that they are ready to take care of the legal bodies of each BUMDes.*

Keywords: *Village-owned enterprises; work program.*

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 2021 mengisyaratkan bahwa BUMDes wajib menyesuaikan dengan PP ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PP ini diundangkan” (terbit 01 Februari 2021). Salah satu yang harus disesuaikan adalah BUMDes harus memiliki badan hukum, selama ini hanya merupakan badan usaha, tetapi pasca PPRI No. 11 Tahun 2021 menjadi badan hukum yang menjalankan usaha, sehingga ruang lingkup BUMDes menjadi lebih luas.

Alur pendaftaran pengurusan badan hukum mengacu pada PPRI No. 11 tahun 2021 adalah: 1). Pengajuan nama BUMDes, 2). Persetujuan nama, 3). Musyawarah desa/musyawarah antar desa, 4). Pendaftaran badan hukum BUMDes (dokumen pendukung), 5). Penerbitan sertifikat badan hukum (Kemendes, 2022).

Lampiran I Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa, dokumen pendukung pengurusan badan hukum adalah: 1). Berita acara musyawarah desa/musyawarah antar desa pendirian BUMDes, 2). Peraturan desa tentang pendirian BUMDes dan pengesahan anggaran dasar BUMDes, 3). Peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUMDes dan pengesahan anggaran dasar BUM Desa, 4). Anggaran rumah tangga BUMDes, 5). Rencana program kerja.

Rencana strategis BUMDes merupakan kerangka perencanaan dan penentuan kebijakan, perlu menyusun Rencana Strategis BUMDes (RSB). RSB memiliki beberapa fungsi antara lain: 1). Sebagai kontrak kinerja dan dasar evaluasi kinerja keuangan dan non keuangan. 2). Sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bumdes, 3). Sebagai panduan gerak langkah pengelola Bumdes untuk memadukan berbagai sumberdaya yang ada untuk meraih tujuan. Untuk dapat menyusun itu semua maka Penasehat, Pengawas dan Pengelola Bumdes harus duduk bersama dan melakukan analisa dan musyawarah (Suryanto, 2019).

Rencana program kerja merupakan dokumen pendukung yang berisikan tentang: 1). profil BUMDes (visi dan misi, struktur organisasi dan sumber daya manusia, dan kepemilikan modal, 2). Evaluasi kinerja tahun sebelumnya (kondisi internal dan kondisi eksternal), 3). Rencana kerja (sasaran badan usaha, strategi dan kebijakan dan rencana kerja), 4). Indikator kinerja kunci pelaksana operasional, 5). Rencana kerja sama (kerjasama usaha dan kerjasama non usaha) dan 6). Rencana kegiatan dan kebutuhan (PP RI No. 3 tahun 2021)

Kendala secara umum yang dihadapi oleh BUM Desa adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi (Herudiansyah, 2021). BUMDes banyak yang tidak memiliki laporan keuangan, sehingga kinerja keuangan tidak dapat dilakukan (Sunardi *et al.*, 2020). Desa tidak memiliki SDM bidang akuntansi, sehingga pengelolaan keuangan desa, perlu mendapat pendampingan dari perguruan tinggi (Yuliansyah dan Rusmianto, 2015).

Jumlah desa di Indonesia tahun 2021 sebanyak 84.096 desa, jumlah BUMDes sebanyak 51.134 (Kemendes. 2021), jumlah yang proses badan hukum sebanyak 44.601 bumdes (pengajuan nama 3.150 bumdes; terverifikasi nama 28.483 bumdes; mendaftarkan badan hukum 6.572 bumdes dan terverifikasi dokumen 6.396 bumdes. (Kemendes, 2022), khusus Sumatera Selatan jumlah BUMDes sebanyak 2.403 Bumdes dari jumlah desa 2.406 desa dan yang sedang melakukan pengurusan badan hukum sebanyak 2.042 (pengajuan nama sebanyak 195; verifikasi nama sebanyak 1.523; mendaftarkan badan hukum sebanyak 246 dan terverifikasi dokumen sebanyak 78) (Kemendes, 2022).

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes yang ada di berbagai kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan belum menyelesaikan pengurusan badan hukum, berdasarkan wawancara dengan beberapa tenaga ahli tingkat kecamatan, bahwa kendala sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengisian dokumen rencana program kerja menjadi factor utama, mayoritas pengurus BUMDes adalah lulusan SLTA, sebagian kecil adalah lulusan S1 tetapi minim sekali yang berlatar belakang ilmu ekonomi, sehingga mengalami kesulitan. Berdasarkan alasan tersebut maka Universitas Muhammadiyah Palembang, berinisiatif untuk mendampingi penyusunan dokumen rencana kerja pada 5 BUMDes di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

METODE

Bahan dan Alat

Pendampingan penyusunan dokumen rencana program kerja BUMDes, memerlukan bahan yang berbentuk: a). Template atau format rencana program kerja (lampiran 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2021), b). Profil BUM Desa (visi dan misi, struktur organisasi dan sumber daya manusia, dan kepemilikan modal), c). Kinerja BUMDes tahun sebelumnya, d).Laporan Keuangan BUMDes tahun sebelumnya, e). Kontrak kerjasama (usaha dan non usaha), f). Rencana program kerja, dan g). Kebutuhan BUMDes tahun yang akan datang. Alat yang diperlukan untuk melakukan pendampingan adalah Laptop dan *Liquid Crystal Display* (LCD) serta contoh rencana program kerja BUMDes.

Metode

Pendampingan kegiatan difokuskan pada pengurus BUMDes yang masih aktif dan memahami proses pendiriannya, yaitu sebanyak 10 orang yang terdiri dari Ketua, Bendahara, dan sekretaris BUMDes. Metode yang digunakan adalah *participatory action research* (PAR) Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan dan didampingi oleh 2-3 mahasiswa UM Palembang yang sudah diberi pelatihan sebelumnya dan Terangkum dalam (Tabel 1).

Tabel.1. Jadwal dan Materi Kegiatan

Hari/ Tanggal	Waktu	Materi
Minggu/ 30 Januari 2022	09.00 s.d 12.000	Isi dokumen Rencana Program kerja
Sabtu/ 5 Februari 2022	09.00 s.d 12.00	Contoh pengisian Dokumen Program kerja dan Penugasan
Minggu/ 13 Februari 2022	09.00 s.d 12.00	Evaluasi penugasan pengisian Dokumen Rencana program kerja

Persiapan

1. Melakukan persiapan komunikasi secara lisan dan tulisan dengan pengurus BUMDes dan Kepala Desa sebagai penasehat BUMDes.
2. Melakukan pelatihan kepada mahasiswa tentang pengisian dokumen rencana program kerja.
3. Menyiapkan bahan dan alat untuk kegiatan pendampingan serta koordinasi tempat kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan:

1. Menjelaskan dan memberi contoh isi dokumen rencana program kerja dan format yang dipergunakan.
2. Menjelaskan dokumen-dokumen BUMDes yang harus disiapkan.
3. Membahas tentang profil BUMDes (Visi dan Misi, struktur organisasi, Sumber daya Manusia dan kepemilikan modal).
4. Melakukan evaluasi atas kinerja tahun lalu, meliputi:
 - a) Kondisi internal, meliputi: kondisi sumber daya manusia, perkembangan usaha BUM Desa dan unit usaha BUMDes, progres kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha serta kondisi keuangan.
 - b) Kondisi eksternal, meliputi: tantangan usaha, potensi, peluang, prospek usaha
5. Menjelaskan rencana kerja, meliputi:
 - a) Sasaran Perusahaan
 - b) Strategi dan Kebijakan
 - c) Rencana Kerja , meliputi: Matrik rencana kerja, proyeksi laba-rugi, proyeksi beban pokok penjualan, proyeksi neraca, proyeksi arus kas, proyeksi investasi dan sumber pembiayaan dan proyeksi tingkat kesehatan perusahaan
6. Menjelaskan Indikator Kinerja Kunci Pelaksana Operasional
7. Menjelaskan Rencana Kerjasama (usaha dan non usaha)
8. Menjelaskan Rencana kegiatan dan Kebutuhan
9. Pemberian Tugas Pengisian dokumen rencana program kerja

Evaluasi dan Penutup

1. Evaluasi pengisian Dokumen rencana program kerja
2. Persepsi rencana program kerja bagi pengelola BUM Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan Kegiatan

Persiapan dilakukan dengan cara menghubungi kepala desa melalui telepon dan ketua BUM Desa, bersepakat untuk melakukan kegiatan selama tiga kali pertemuan, lama waktu 240 menit dan tempat kegiatan disepakati di Rumah Pondok Tanjung Batu, setelah itu dilakukan secara tertulis. Selanjutnya pelatihan mahasiswa dilakukan secara online dan offline, sementara bahan dan alat dipersiapkan oleh mahasiswa agar pelaksanaan dapat berjalan secara efektif (**gambar 1** dan **gambar 2**).



Gambar. 1. Pelatihan Penyusunan Rencana Program kerja Untuk Mahasiswa

Pelaksanaan kegiatan

Sebelum menjelaskan rencana program kerja, dilakukan pre tes tentang rencana program kerja. Dari 10 peserta pendampingan, hanya 3 peserta yang mengetahui program kerja kegiatan. Format rencana program kerja yang sudah disiapkan dibagikan kepada peserta untuk dibaca dan dipahami sekitar 15 menit. Membahas profil BUM Desa, menjadi materi yang menarik karena banyak yang menyusun visi dan misi tetapi tidak memahami makna yang ditulis. Struktur organisasi di BUM Desa sebagian besar hanya gambar dan orang-orangnya tidak pernah bekerja, BUM Desa hanya dikerjakan oleh 1-2 orang saja yang dikerjakan secara sambilan dan tidak memiliki latar belakang Pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. Hal inilah menjadi awal permasalahan berkembangnya BUM Desa. Modal yang dimiliki BUM Desa lebih banyak dipergunakan untuk membiayai operasional yang tidak menghasilkan pendapatan yang proporsional, sehingga modal setiap tahun catatan bertambah tetapi secara riil tidak bertambah. Hal ini memotivasi diadakannya kegiatan pendampingan guna menjelaskan pentingnya visi dan misi, sumber daya manusia (struktur organisasi) serta penggunaan modal agar BUMDes bisa berkembang sesuai dengan tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Rencana Program kerja Pengelola BUMDes

Hasil evaluasi pada kegiatan ini menunjukkan bahwa pengurus BUMDes tidak pernah melakukan penilaian kinerja pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan penasehat dan pengawas BUMDes tidak pernah meminta laporan kinerja BUMDes. Sementara dalam membuka BUMDes dilakukan studi kelayakan sangat diperlukan (Umar, 2009) namun pengurus BUMDes belum memahaminya, sehingga tidak mengetahui adanya tantangan, peluang, potensi, dan prospek usaha yang ada. Berdasarkan kasus yang terjadi BUMDes pada kegiatan ini maka sangat diperlukan pendampingan dalam kinerja dan evaluasi BUMDes agar dimasa datang BUMDes dapat menghasilkan kegiatan yang menguntungkan masyarakat.

Dalam menyusun rencana kerja pengurus BUM Desa harus menyusun matrik rencana kerja yang akan dilakukan 1 (satu) tahun mendatang, serta membuat berbagai proyeksi atau prediksi tentang laba yang akan dicapai, neraca yang akan ditargetkan serta laporan arus kas, agar BUM Desa dapat memenuhi kewajibannya. Investasi juga perlu dilakukan apabila BUM Desa memiliki dana yang tidak dipergunakan, serta atau menghitung rasio rasio keuangan yang dipergunakan untuk mengukur kesehatan BUM Desa. Ternyata dalam praktiknya dari 5 BUM Desa ini belum melakukan rencana program kerja secara tertulis dan berkesinambungan.

Minimnya kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes juga menjadi salah satu penghambat perkembangan BUMDes di 5 Desa ini, Pengurus BUMDes belum memahami manfaat dan pentingnya kerjasama baik yang berhubungan dengan usaha maupun non usaha, sehingga ini juga dijelaskan pada saat kegiatan, misalnya kerjasama dengan BRI untuk menerima pembayaran listrik, kerjasama dengan SAMSAT untuk membantu pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan lainnya yang perlu digali terus melalui musyawarah desa., serta kerjasama non usaha dengan perguruan tinggi.

Evaluasi dan Penutup

Penyusunan Rencana program kerja BUMDes dapat terlaksana, dengan beberapa asumsi keterbatasan data dan informasi, sehingga perlu ada pengarsipan dokumentasi BUMDes yang baik, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi BUMDes dan selanjutnya disampaikan dalam musyawarah desa untuk mendapatkan persetujuan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penyusunan rencana program kerja di lima BUMDes berjalan lancar dan dapat diselesaikan, pengurus semangat untuk belajar, walaupun minimnya data yang dimiliki, sehingga pengurus BUMDes mengkomunikasikan dengan masyarakat dalam wadah Musyawarah Desa (Musdes) agar semua warga ikut terlibat dan bertanggungjawab atas pengelolaan BUMDes dapat berhasil. Selanjutnya dokumen ini nanti dapat dipergunakan salah satu syarat pendukung pengurusan Badan Hukum. Saran, BUMDes harus memiliki sumber daya manusia yang fokus untuk mengurus usahanya yang memiliki pemikiran untuk maju, selain itu dokumentasi (arsip) harus dilakukan dengan baik serta kerjasama dengan pihak luar agar dapat membantu usaha maupun non usaha BUMDes.

DAFTAR REFERENSI

- Herudiansyah, G., Sahri, Y., Hasanah, T., Andayani, M., dan Nugraha, R. (2021). Pendampingan Manajemen Tata Kelola Bumdes dan UMKM Desa Payo Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. *Jurnal Suluh Abdi*. 3 (2). 113-118. <https://doi.org/10.32502/suluhabdi.v3i2.3976>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021. Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- Suryanto, R. (2019). Modul Penyusunan Rencana Strategis Bumdes. Yogyakarta: UAI Press.
- Sunardi, Isnaini, D.m dan Apriyanto (2020). Potret Bumdes Kecamatan Air Sugihan dan kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, *Jurnal Martabe*, 3(1). 73-80. <http://dx.doi.org/10.31604/jpm.v3i1.73-80>.

Umar, H. (2009). Studi Kelayakan Bisnis- Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis Secara Komprehensif, Edisi 3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utam.
Yuliansyah dan Rusmianto. (2015). Akuntansi Desa, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.